

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengemis

1. Definisi Pengemis

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁵ Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara baik berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.⁶

2. Fenomena Pengemis

Populasi Gelandangan, Pengemis dan Pemulung secara nasional terlihat naik turun menurut Pusat data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial lima tahun terakhir tahun 2007 berjumlah 61.090 dan pada tahun 2011 berjumlah 194.908 ada kenaikan 17% penyebab banyaknya gelandangan dan pengemis di kota besar, bukan melulu korban dari tidak adanya lapangan pekerjaan, tetapi juga dari faktor tidak adanya keinginan untuk berusaha dan ketidakmemilikinya keterampilan, dan pada kenyataannya banyak kita lihat

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

⁶ Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

gelandangan yang justru masih mampu untuk berusaha. berusaha dalam arti apa saja yang penting bisa makan.⁷

Untuk mendefinisikan kemiskinan, Pemerintah Pusat membuat kriteria berdasarkan beberapa pendekatan. Seperti yang dirilis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2004), pemerintah memaknai kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya guna mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat. Pendekatan yang digunakan meliputi : *basic needs* (menekankan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar sebagai sumber kemiskinan)/ *income poverty* (menekankan tiadanya kepemilikan aset dan alat produksi)/ *basic capability* (menekankan keterbatasan kemampuan dasar untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat)/ *social welfare* (tekanan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan)/ serta *subjective* (cara pandang kemiskinan dari sudut orang miskin) pandangan orang miskin sendiri).

Dari situ disusun beberapa indikator, di antaranya : akses dan mutu pendidikan yang rendah; kesempatan kerja dan berusaha yang terbatas; ketersediaan perumahan dan sanitasi yang minim; lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; lemahnya jaminan rasa aman; lemahnya partisipasi; hingga

⁷ Tira. Gelandangan dan Pengemis Isu Permasalahan Sosial. <http://rehsos.kemsos.go.id>, diakses tanggal 17 Juni 2015.

besarnya beban kependudukan akibat dari besarnya tanggungan keluarga berikut tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi.

Atas dasar indicator tersebut, kemudian dapat dikelompokkan golongan social tertentu yang mana dianggap sebagai kaum marginal di wilayah urban dan menjadi fenomena social di wilayah perkotaan. Pedagang kaki lima (PKL), bangunan tanpa izin, izin gangguan (HO), reklame, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, merupakan contoh kelompok tersebut, yang mana kini telah menjadi fenomena sosial di setiap kota besar. Bahkan, realitas tersebut dapat dikatakan sebagai artefak kota yang tercipta untuk mengisi ruang-ruang “kosong” yang ada. Maka, terasa aneh dan janggal jika kota tidak menyediakan ikon-ikon budaya yang dipresentasikan dalam fenomena perkotaan ini.

Dalam hal ini, keberadaan gelandangan dan pengemis memang menjadi sesuatu yang tak terelakkan terjadi di kota besar, dimana salah satunya adalah Malang. Memang, persoalan kaum pinggiran di berbagai kota menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah kota bertanggung jawab atas warganya dalam persoalan kesejahteraan. Di sisi lain, Pemkot membutuhkan wajah kota yang indah, bersih, dan tertata sebagai tuntutan ruang kota yang sehat. Dinas Sosial Kota Malang menyebutkan bahwa jumlah pengemis anak-anak hingga tua pada tahun 2005 jumlahnya mencapai 277 orang, 2006 berjumlah 320 orang dan 2007 berjumlah 378 orang. Tempat-tempat pengemis untuk mencari rejeki adalah tempat-tempat yang banyak dilewati

orang dan kendaraan bermotor. Tempat-tempat seperti ini yang ada di Kota Malang adalah di kawasan Alun-Alun, perempatan jalan, kampus, Malang Plasa, Gajah Mada, Mitra1, pasar, terminal, stasiun dan tempat ibadah. Pada waktu hari besar agama jumlah pengemis jalanan di Kota Malang semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan dampak negatif bagi kota yaitu dapat mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga kota dan dapat mengotori lingkungan kota.⁸

Merebaknya kaum pinggiran di perkotaan memang memperburuk wajah kota. Namun, kaum pinggiran bukan satu-satunya the trouble maker. Persoalan sebenarnya adalah tidak adanya kebijakan tata letak kota yang berkelanjutan (*sustainable policy*). Seharusnya pemkot menyediakan peraturan daerah (perda) dalam mengatur, menata, sekaligus memberdayakan kaum pinggiran. Ini penting karena kaum pinggiran juga merupakan aset daerah yang memberi pemasukan pada pemkot.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu perencanaan tersendiri guna menanggulangi permasalahan kemiskinan di perkotaan, yang mana salah satunya menyebabkan maraknya gelandangan dan pengemis di kota-kota besar. Dalam strategy planning akan memunculkan pola dan karakter persoalan di perkotaan yang fundamental (*the rooted problem of urban*).

⁸ Intan Wahyu Megasari. Karakteristik Pengemis Jalanan di Kota Malang. <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/1297>, di akses tanggal 17 Juni 2015.

Situasi perekonomian kita yang berantakan, di mana pertumbuhan ekonomi masih rendah sedangkan pengangguran bertambah, tindakan penataan kaum pinggiran yang dalam realitasnya adalah penggusuran dan penghilangan peluang usaha, justru mendekatkan pada krisis baru. Krisis yang dimaksud ini antara lain adalah berkembangnya jumlah gelandangan dan pengemis di wilayah kota, sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi perkotaan berkaitan dengan upaya tata kota dan juga pengentasan kemiskinan sebagai salah satu upaya sosial.⁹

3. Faktor-faktor Penyebab Munculnya Pengemis

Gelandangan dan pengemis disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit masyarakat (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.¹⁰

Menurut Dimas Dwi Irawan ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis tersebut yaitu merantau dengan modal nekad, malas berusaha, disabilitas fisik/cacat fisik, tidak adanya lapangan kerja, tradisi yang turun temurun, mengemis daripada mengganggu, harga kebutuhan pokok yang mahal, kemiskinan dan terlilit

⁹ Peguh Setyo Aprilianto. 2008. *Efektifitas Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Malang*. Malang. Skripsi. Fakultas Hukum. UMM. Hal. 12.

¹⁰ Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 4.

masalah ekonomi yang akut, ikut-ikutan saja, disuruh orang tua, dan menjadi korban penipuan.¹¹

a. Merantau dengan modal nekad

Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kemampuan ataupun modal yang kuat. Sesampainya di kota, mereka mencoba dan berusaha meskipun hanya dengan kenekatan untuk bertahan menghadapi kerasnya hidup di kota. Belum terlatihnya mental ataupun kemampuan yang terbatas, modal nekad, dan tidak adanya jaminan tempat tinggal membuat ia tidak bisa berbuat apa-apa di kota sehingga mereka memilih untuk menjadi gelandangan dan pengemis;

b. Malas berusaha

Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enak saja tanpa berusaha terlebih dahulu;

c. Disabilitas fisik/cacat fisik

Adanya keterbatasan kemampuan fisik dapat juga mendorong seseorang untuk memilih menjadi gelandangan dan pengemis dibanding bekerja. Sulitnya lapangan kerja dan kesempatan bagi penyandang cacat fisik untuk

¹¹ Dimas Dwi Irawan, 2013, *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Titik Media Publisher, Jakarta, Hal 6.

mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka pasrah dan bertahan hidup dengan cara menjadi gelandangan dan pengemis;

d. Tidak adanya lapangan kerja

Akibat sulit mencari kerja, apalagi yang tidak bersekolah atau memiliki keterbatasan kemampuan akademis akhirnya membuat langkah mereka seringkali salah yaitu menjadikan meminta-minta sebagai satu-satunya pekerjaan yang bisa dilakukan;

e. Tradisi yang turun temurun

Mengemis dan menggelandang merupakan sebuah tradisi yang sudah ada dari zaman kerajaan dahulu bahkan berlangsung turun temurun kepada anak cucunya;

f. Mengemis dari pada menganggur

Akibat kondisi kehidupan yang serba sulit dan didukung oleh keadaan yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan membuat beberapa orang mempunyai mental dan pemikiran daripada menganggur maka lebih baik mengemis dan menggelandang;

g. Harga kebutuhan pokok yang mahal

Bagi sebagian orang, dalam menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhannya adalah dengan giat bekerja tanpa mengesampingkan harga diri, namun ada sebagian yang lainnya lebih memutuskan untuk mengemis karena berpikir tidak ada cara lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

h. Kemiskinan dan terlilit masalah ekonomi yang akut

Kebanyakan gelandangan dan pengemis adalah orang tidak mampu yang tidak berdaya dalam menghadapi masalah ekonomi yang berkelanjutan. Permasalahan ekonomi yang sudah akut mengakibatkan orang-orang hidup dalam krisis ekonomi dihidupnya sehingga menjadi gelandangan dan pengemis adalah sebagai jalan bagi mereka untuk bertahan hidup;

i. Ikut-ikutan saja

Kehadiran pendatang baru sebagai gelandangan dan pengemis sangat sulit dihindari, apalagi didukung oleh adanya pemberitaan tentang pengemis dan gelandangan yang begitu mudahnya mendapatkan uang di kota yang akhirnya membuat mereka yang melihat fenomena tersebut ikut-ikutan dan mengikuti jejak teman-temannya yang sudah lebih dahulu menjadi gelandangan dan pengemis;

j. Disuruh orang tua

Biasanya alasan seperti ini ditemukan pada pengemis yang masih anak-anak. Mereka bekerja karena diperintahkan oleh orang tuanya dan dalam kasus seperti inilah terjadi eksploitasi anak;

k. Menjadi korban penipuan

Penyebab seseorang menjadi gelandangan dan pengemis tidak tertutup kemungkinan dapat disebabkan oleh karena kondisi mereka yang menjadi korban penipuan. Hal ini biasanya dapat terjadi di kota besar yang memang rentan terhadap tindak kejahatan apalagi bagi pendatang baru yang baru

sampai di kota. Pendatang baru ini sering mengalami penipuan seperti yang disebabkan oleh hipnotis dan obat bius. Peristiwa seperti itu dapat membuat trauma bagi yang mengalaminya dan akibat tidak adanya pilihan lain akhirnya mereka pun memutuskan untuk menjadi peminta-minta untuk bisa pulang atau bertahan hidup di kota.

4. Modus Pengemis

Hampir seluruh kota di Indonesia memiliki pengemis. Ada yang mengemis karena benar-benar tidak mampu mencari nafkah selain mengemis. Namun, tak sedikit pula yang diorganisir sindikat. Tak jarang ditemukan pengemis yang memiliki kehidupan layak. Ada pengemis yang ditemukan memiliki sejumlah sertifikat tanah dan uang puluhan juta. Bahkan, ada pengemis yang memiliki rumah dan mobil mewah. Berikut modus penipuan pengemis paling kreatif di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. Modus ini didasarkan pada fakta saat petugas Satpol PP atau Dinas Sosial melakukan penertiban pengemis.¹²

a. Pengemis pura-pura tangan buntung

Sebagian pengemis berpura-pura tangannya buntung agar pengguna jalan iba melihatnya. Si pengemis melipat dan mengikat tangannya ke belakang, lalu menggunakan baju lengannya agak longgar, sehingga terlihat seperti orang buntung.

¹² Syaifullah defaza. Awas ketipu, kenali 10 modus pengemis di Indonesia ini. <http://sumut.pojoksatu.id/2016/03/02/10-modus-pengemis-di-indonesia/3/>, diakses tanggal 10 juni 2017.

b. Pengemis pura-pura kaki buntung

Sama seperti modus pura-pura tangan buntung. Sebagian pengemis juga melakukan modus pura-pura kaki buntung. Kakinya dilipat ke belakang, lalu mengenakan celana agak longgar. Mereka duduk di jalan mengharapkan belas kasih dari para dermawan

c. Pengemis pura-pura buta

Sebagian pengemis nekat pura-pura buta. Biasanya mereka memakai tongkat atau dituntun seseorang untuk meminta belas kasih. Namun modus ini kerap terbongkar oleh petugas saat melakukan penertiban.

d. Pengemis pura-pura pincang

Modus pengemis yang paling banyak ditemui adalah pura-pura pincang. Si pengemis pura-pura menggunakan tongkat, lalu berjalan pincang menemui para dermawan untuk meminta belas kasih.

e. Pengemis pura-pura hamil

Tak jarang ditemukan pengemis wanita yang tampak hamil di lampu merah. Mereka tampak keletihan saat bergerak. Padahal, itu hanya modus. Di balik perutnya yang buncit, si pengemis menyelipkan bantal dan hanya pura-pura hamil.

f. Bikin luka bohongan di tubuh, kemudian diolesi terasi

Pengemis membuat luka bohongan di bagian tubuhnya agar pengguna jalan ibat melihatnya. Luka bohongan itu diolesi terasi untuk mengundang lalat,

sehingga terkesan bahwa luka tersebut sudah busuk dan butuh biaya pengobatan.

g. Sekeluarga tidur di gerobak

Tak jarang pengemis pura-pura tidur di gerobak bersama istri. Modus seperti ini biasanya marak pada bulan Ramadhan. Kemudian pada siang hari, suami menarik gerobak yang isinya anak dan istri. Modus ini dilakukan untuk memunculkan kesan bahwa sekeluarga tersebut tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dermawan merasa iba dan memberikan belas kasih.

h. Pengemis gendong balita di jalan

Anak kecil menjadi cara ampuh bagi pengemis untuk mendulang rupiah. Dengan membawa anak balita, warga akan semakin iba sehingga dengan ikhlas akan memberikan uang. Cara seperti ini sengaja digunakan para pengemis. Kadang anak sengaja didandani semiris mungkin, lalu disuruh mengemis.

i. Pengemis dorong nenek sakit

Tak jarang pengemis membawa nenek yang pura-pura sakit agar lebih dramatis. Si nenek ditampilkan dalam kondisi tidak sehat, lalu didorong menggunakan gerobak. Ada pula yang pura-pura tidur di jalan dengan ekspresi sangat memilukan. Hal itu dilakukan untuk menarik perhatian pengguna jalan agar memberi belas kasih.

j. Pengemis dramatisir luka di tubuh

Tak jarang pengemis mendramatisir luka bawaan dari kecil untuk menarik perhatian dan rasa iba dari para dermawan. Modusnya, pengemis yang memang memiliki cacat dari kecil akibat tersiram air panas dibuat didramatisir seakan-akan luka itu merupakan luka baru dan butuh biaya pengobatan.

B. Teori Efektifitas Hukum

1. Definisi Efektifitas

Kata “efektivitas” menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni “*effective*” yaitu baik hasilnya, mempan, tepat, benar.¹³ Sedangkan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

a. Efektif artinya:

- (1) Ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- (2) Manjur atau mujarab,
- (3) Dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan),
- (4) Mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

b. Keefektifan artinya:

- (1) Keadaan berpengaruh,

¹³ Dalam Niniek Suparni, S.H. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal 59

- (2) Hal berkesan,
- (3) Kemanjuran,
- (4) Kemujaraban,
- (5) Keberhasilan (usaha,tindakan), dan
- (6) Hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).¹⁴

2. Definisi Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum secara sosiologis atau empiris, yang intinya adalah efektifitas hukum. Efektifitas hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁵

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, efektifikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum yang berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolak ukur efektivitas.

¹⁴ Dalam Dr. H. Salim HS, S.H.,M.S. Dan Erlies Septiana Nurbani, S.H., LLM. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal 301-302

¹⁵ Muhammad Fachri. Catatan kampus. <http://muhammadfachriramli.blogspot.com/2012/12/seberapa-efektif-hukum-itu.html>, diakses tanggal 02 Juni 2014.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi factor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Hukumnya Sendiri,
- b. Penegak Hukum,
- c. Sarana dan fasilitas,
- d. Masyarakat,
- e. Kebudayaan.

a. Faktor Hukumnya sendiri

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup :

- 1) Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain :

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. Hal 8

- 1) Undang-undang tidak boleh berlaku surut,
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula,
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum,
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu,
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat,
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).¹⁷

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang – undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum yang ada secara tertulis saja, melainkan masih banyak aturan – aturan yang hidup di dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Jika

¹⁷ Ibid. Hal, 11

hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung kepada nilai – nilai intrinsik subjektif masing – masing dari sudut pandang orang.¹⁸

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut :¹⁹

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*percieved role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

¹⁸ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal 31

¹⁹ Soerjono soekanto, Op.cit. hal.19

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas petugas kurang baik sama saja bohong. Dalam konteks tersebut yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum di identikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum, seorang penegak hukum sebagaimana seperti masyarakat yang lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik.²⁰ Sayangnya dalam melaksanakan wewenang sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukumnya itu sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalu hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana yang ada di Indonesia sekarang ini memang

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal 21

diakui masih cukup tertinggal dibandingkan jika dengan negara maju yang memiliki sarana lengkap dengan teknologi canggih di dalam membantu menegakkan hukum.²¹

d. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga di dalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak akan ada yang namanya keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal 37

²² Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hal 59

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu :²³

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme

Nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan. Secara psikologis keadaan tentram ada bila seorang tidak merasa khawatir, tidak merasa diancam dari luar dan tidak terjadi konflik bathiniah. Di Indonesia terdapat berbagai macam kebudayaan yang mendasari hukum adat yang berlaku. Hukum adat tersebut merupakan hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan rakyat terbanyak. Di samping itu, berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan) yang timbul dari golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang resmi. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari huku adat supaya hukum perundang-undangan dapat berlaku secara efektif.²⁴

Pasangan nilai-nilai kebendaan dan keakhlakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi di dalam kenyataan pada masing-masing masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena pelbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan-kegiatan modernisasi di bidang materiil,

²³ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 60

²⁴ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 60-65

misalnya, tidak mustahil menepatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keakhlakan sehingga akan timbul suatu keadaan yang tidak serasi. Hal ini akan mengakibatkan bahwa pelbagai aspek proses hukum akan mendapat penilaian dari segi kebendaan belaka.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovatisme senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan “status quo”. Di lain pihak ada anggapan-anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya, oleh karena *“law must be stable and yet it can not stand still. Hance all thingking abaout law has struggled to reconcile the conflictingdemands of the need of stability and of the need of change “*.²⁵

C. Penegakan Hukum

1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku

²⁵ Soerjono Soekanto, *ibid*, hal 66-67

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan , kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara

²⁶ Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty. hal 32

konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.²⁷

2. Teori Penegakan Hukum

²⁷ Digilib Unila. *BAB II Tinjauan Pustaka*. <http://digilib.unila.ac.id/3892/11/BAB%20II.pdf> , Diakses tanggal 16 Maret 2015

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat

penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

b. *Full Enforcement*

Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

c. *Actual Enforcement*

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- (1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

- (2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- (3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.²⁸

Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada empat elemen utama dari sistem hukum (legal system), yaitu:²⁹

- a. Isi/Substansi Hukum (Legal Substance)
- b. Struktur Hukum (Legal Structure)
- c. Budaya Hukum (Legal Culture)

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada : Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum, dan Budaya Hukum.

- a. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada

²⁸ *Ibid* hal 3

²⁹ DocSlide. *Teori Sistem Hukum Friedman*. <http://dokumen.tips/documents/teori-sistem-hukum-friedman.html>, diakses tanggal 20 Desember 2015.

dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusny suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

c. Budaya Hukum/Kultur Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari,

atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdikan hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat

dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

3. Pembentukan Peraturan Yang Baik

Peraturan perundang undangan merupakan hasil karya atau produk hukum dari lembaga dan atau pejabat Negara yang mempunyai wewenang sesuai dengan fungsinya dan diatur dengan tata cara yang berlaku.

Menurut Bagir Manan, suatu peraturan yang baik setidaknya didasari pada 3 hal, yaitu :³⁰

- a. Dasar Yuridis yakni pertama keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang undangan yang artinya setiap aturan yang akan dibuat harus berdasarkan badan atau pejabat yang berwenang, kalau tidak maka aturan tersebut akan batal demi hukum. Kedua yakni adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketiga keharusan mengikuti tata cara tertentu yaitu harus disahkan oleh ketua atau pimpinan dan telah di sosialisasikan. Keempat keharusan tidak bertentangan dengan UUD dan demikian seterusnya sampai pada peraturan di bawahnya.

³⁰ Rachmat Trijono, 2013, *Dasar Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang – Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta. Hal 49

- b. Dasar sosiologis yakni mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat yang artinya aturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. Kenyataan tersebut dapat berupa kebutuhan atau tuntutan masalah masalah yang sedang di hadapi seperti masalah yang sedang terjadi dimasyarakat yang perlu kepastian hukum.
- c. Dasar filosofis yakni bahwa setiap masyarakat selalu mempunyai harapan ataupun citra hukum yaitu apa yang ingin masyarakat inginkan dari hukum itu sendiri.

D. Peraturan Perundang-undangan

Dalam penanggulangan atau penanganan masalah pengemis khususnya yang terjadi di Kota Malang, maka terdapat beberapa aturan hukum yang relevan dan dapat dijadikan pedoman/landasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 504

- (1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisian dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.
- (2) Pengemisian yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur diatas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan untuk mendapat penghasilan dengan meminta-minta/ mengemis dimuka umum baik di jalan, taman dan tempat-tempat lain dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah membuat penampungan dan/atau tempat pembinaan bagi anak jalanan, gelandangan, pengemis, atau penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Tempat penampungan dan/atau tempat pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun pihak- pihak yang peduli terhadap permasalahan sosial.

E. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

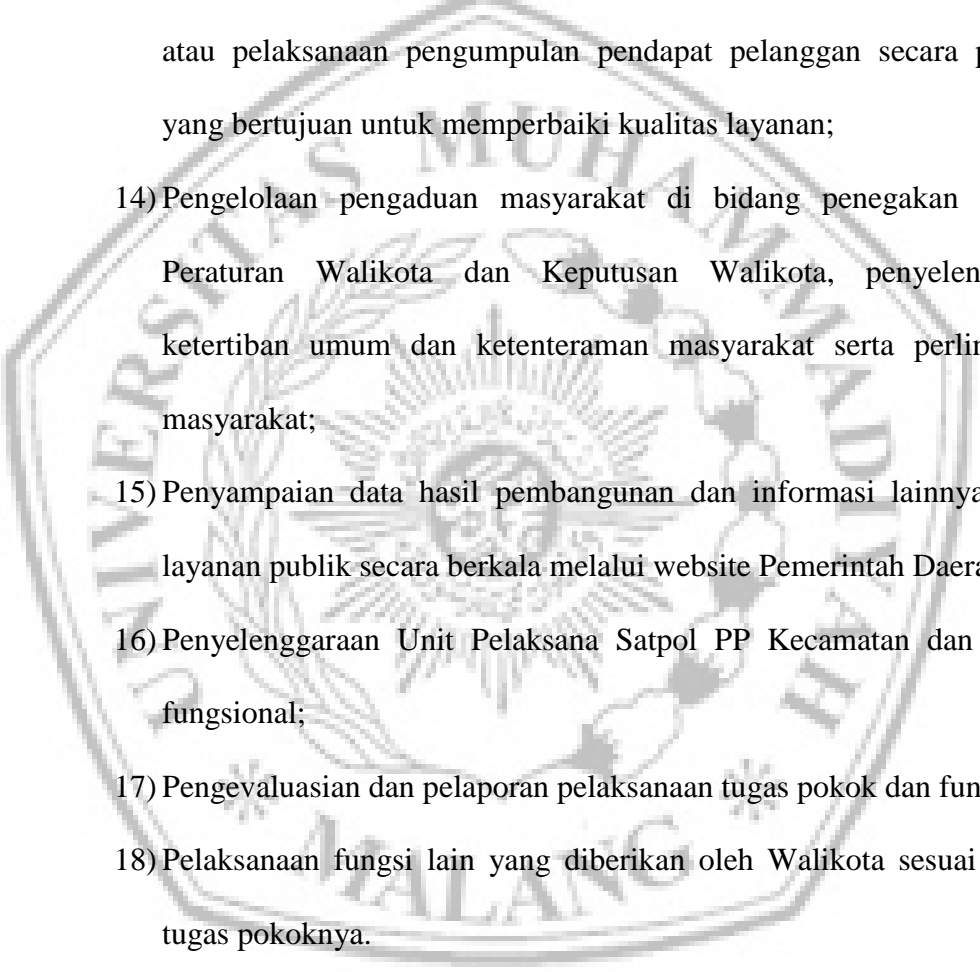
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Satpol PP melaksanakan tugas lainnya yang meliputi :

- 1) Mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota
- 2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara
- 3) Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Walikotan dan Wakil Walikota
- 5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang bersekala masal
- 6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- 2) Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

- 3) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota serta penyelegaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian, PPNS dan / atau Aparatur lainnya;
- 4) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
- 5) Pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;
- 6) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pelaksanaan pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 8) Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- 9) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- 10) Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

- 
- 11) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 12) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
 - 13) Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan / atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - 14) Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan Perda , Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 15) Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
 - 16) Penyelenggaraan Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dan jabatan fungsional;
 - 17) Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
 - 18) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);
- e. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Peraturan Walikota Malang nomor 68 tahun 2012 tentang Uraian tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.

